

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2017). Kartel dalam Persaingan Usaha Bidang Penerbangan Menurut UU No.5 Tahun 1999 (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.613.K/PDT.Sus/2011), Berdasarkan Penulisan Ilmiah. Universitas Medan Area, [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1258/5/158400172_file5.pdf)
- Abidin, A. Z., 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni.
- Adji, O. S., 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga.
- Adonara, F. F. (2015). Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), pp. 6. <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>
- Ala, A. (2010). Pembumian Keadilan Substantif. UIN Sunan Ampel. <http://artikel-media.blogspot.com/2010/01/pembumian-keadilan-substantif.html?m=1>
- Ali, A., Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009)
- Andrisman, T., 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N., 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arsyad, J. H., 2013, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Chazawi, A., 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Ed. Revisi*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Danil, E. dan Nelwitis., 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Djaja, E., 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Farid, A. Z. A., & Hamzah, A., 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathurohman, Aminudin, D., & Sirajudin., 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Ilman, "Perbedaan Pidana Kurungan dengan Pidana Penjara." Hukumonline.com, 1 Juni 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-lt4fbddb474ff92>
- Hamzah, A., 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A., 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hamzah, A., 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanata, D. (2017). Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(1), pp. 88. DOI : 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108
- Huda, C., 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ismail, R. (2013). Penapsiran Hakim Terhadap Pidana minimum khusus Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Suatu Kajian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapan). Jurnal Mahkamah Agung RI, 2(3), pp. 126. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.379-404>
- Julyano, M., 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Kharisma, Bella, Kebijakan Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pelacuran Sesuai Dengan Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2000, skripsi (Denpasar: FH Program Ekstensi Universitas Udayana, 2016)
- Maheka, A., 2014, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas, M., 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bima Aksara.

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, pp. 7. ISSN: 1829-7463
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka & Kebijakan Asasi*, Jakarta: STIH IBLAM.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Muladi & Arief, B. N., 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mys. (2012). Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dipertanyakan. *Hukumonline.com*, 9 Oktober 2012, [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com).
- Nov, “Pro Kontra Putusan Videotron, Terobosan atau Kekeliruan?” *Hukumonline.com*, 1 September 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-putusan-videotron--terobosan-atau-kekeliruan-lt54043284bf38a/>.
- Pangaribuan, M. L. M. P., 2016, *Tindak Pidana Ekonomi Dan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Catatan Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Yang Lebih Efektif*, Jakarta: Pustaka Kemang.
- Persatuan Jaksa Indonesia. (2020). Putusan Ultra Petita dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. PJJ Kejaksaan. [pjj.kejaksaan.go.id](http://pjj.kejaksaan.go.id)
- Pradana, Nugraha Andi, Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Batam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JO Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi (Bandung:FH Universitas Pasundan, 2016).
- Prayurisman, A., 2011, *Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan*, Semarang: Genta Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, Satjipto (2005), Hukum Progresif yang Membebaskan, Semarang: *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1/No.1/April 2005.
- Rais, Muslihin “Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, No.6 - 2017, hlm.1-24.

- Rismawati, S. D. (2015). Menebarkan Keadilan Sosial dengan Hukum Progresif di Era Komodifikasi Hukum. Jurnal Hukum Islam, 13(1), pp. 2. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>
- Rozah, Umi, “Problematika Penerapan Logika Positivistik Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tuntutan Keadilan Substantif.” Masalah-masalah Hukum Nomor 1 – 2014, hlm. 140-141.
- Saleh, R., 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sapradjaja, K. E., 2002, *Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia; studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi*, Bandung: Alumni.
- Satria. (2018). Mengkaji Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus. Laman Berita Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/id/berita/16313-mengkaji.asas.kebebasan.hakim.dalam.penjatuhan.pidana.dengan.ancaman.minimum.khusus>
- Satriana, E. (2014). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan. Kejaksaan Negeri Bone. <https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html>
- Senoaji, I., 2005, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Oemar Seno Adji dan rekan”.
- Silaban, Dominggus, Pola pemindaan Tindak Pidana Korupsi, (Kayuagung: Pengadilan Negeri Tinggi, 2015), <http://www.pn-kayuagung.go.id/images/pnkag/Dokumen/POLA-PEMINDAAN-TINDAK-PIDANA-KORUPSI.pdf>
- Sitorus, Angeline Rose, 2019, *Eksistensi Sanksi Pidana Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Yogyakarta: UAJY.
- Sianturi, S. R., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni PT HAEM.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Universitas Diponegoro.
- Sukoyo, Y. (2018). ICW: Tren Korupsi di Indonesia Masih Cukup Tinggi. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/archive/510979/icw-tren-korupsi-di-indonesia-masih-cukup-tinggi>
- Suparni, N., 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Suteki, 2010, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip.
- Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air*, Semarang: Disertasi PDIH Undip.
- Sutrisno, Puluhulawa, & Tijow. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), pp. 181. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/987>
- Suwito & Anshar. (2017). Infra Petita Putusan Pengadilan Tindakan Pidana Korupsi yang Menerobos Ketentuan Pidana Minimum. *Jurnal Komisi Yudisial*, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i2.272>.
- Syahputra, Aprilianto, 2018, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Publik Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Yogyakarta: UII.
- Taha, Feldy, Resume Perkara No.17/PHP.BUP-XIV/2018, (Jakarta: MKRI, 2018).
- Tanya, Bernard L., 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Utrecht, E., 1996, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- Utrecht, E., 1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Utrecht, E., 1965, *Hukum Pidana II*, Bandung: PT. Penerbitan Universitas.
- Waluyo, B., 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. Anatomi Dala Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007. Yogyakarta: FAKULTAS Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wijayanta, Tata. Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Yogyakarta: FH UGM.
- Witanto, D. Y., 2013, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Bandung: ALFABETA.
- Wiyanto & Roni., 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Yanuar, P. M., 2018, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Lampung: Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

Zubaidah. (2021). Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan. PA Marabahan. <http://www.pamarabahan.go.id>

Anonim. (n.d.). Tinjauan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Universitas Lampung. Diakses pada tanggal 25 Februari 2019, <http://digilib.unila.ac.id/2192/7/BAB%20II.pdf>

Anonim, “Penjelasan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.” Kemendagri.

## LAMPIRAN